

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBERADAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN (ORMAS) DITINJAU DARI *INTERNATIONAL
COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR)*.**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

IBNU FADILLAH MIRZA

1310112114

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)



PEMBIMBING

Magdariza, S.H., M.H. (Pembimbing I)

Zimtya Zora, S.H., M.H. (Pembimbing II)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBERADAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN (ORMAS) DI INDONESIA DITINJAU DARI
INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
(*ICCPR*).**

(Ibnu Fadillah Mirza, 1310112114, Hukum Internasional (PK VII), Fakultas
Hukum Universitas Andalas, 69 Halaman, 2018)

ABSTRAK

Berkumpul dan berserikat merupakan hak yang dijamin keberadaannya dalam setiap diri manusia yang diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan diatur secara khusus dalam *International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)*, dalam perwujudan dari hak tersebut manusia berkumpul dan berserikat membentuk organisasi yang salah satunya disebut ormas, pengaturan ormas saat ini di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No 16 Tahun 2017, aturan tersebut didahului dengan dikeluarkannya Perppu No 2 Tahun 2017, dengan dikeluarkannya dan disahkannya aturan tersebut Pemerintah Indonesia telah melakukan pembatasan hak dalam *ICCPR* yang telah diratifikasi Indonesia yang menimbulkan pro dan kontra. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana implementasi pengaturan tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional. 2) Bagaimana analisis hukum akibat hukum dikeluarkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2017 berkaitan dengan keberadaan Ormas di Indonesia ditinjau dari *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Untuk menjawab permasalahan diatas Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum, yuridis normatif. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pertentangan dalam beberapa pasal peraturan ormas terhadap implementasi aturan hukum internasional dan hukum nasional terhadap pengaturan ormas di Indonesia dan akibat hukum yang diterima Pemerintah Indonesia selaku negara peratifikasi *ICCPR* atas pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan hak dalam *ICCPR* melalui komite ham selaku pengawas atas pemenuhan dan implementasi hak yang diatur dalam *ICCPR*. Untuk itu Pemerintah Indonesia harus merevisi pasal-pasal dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2017 yang bertentangan dengan konstitusi serta kaidah hukum internasional serta adanya pembaharuan terhadap pengaturan ormas di Indonesia dan penambahan aturan dalam *ICCPR* mengenai pengawasan dan sanksi yang lebih tegas terhadap negara yang telah melanggar ketentuan dan pemenuhan hak yang diatur dalam *ICCPR*.

Kata kunci: Ormas, *ICCPR*, Undang-Undang Ormas

**LEGAL ANALYSIS ON THE EXISTENCE OF MASS ORGANIZATIONS
(ORMAS) IN INDONESIA REVIEWED FROM INTERNATIONAL
COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR).**

(Ibnu Fadillah Mirza, 1310112114, International Law (PK VII), Faculty of Law
University of Andalas, 69 Page, 2018)

ABSTRACT

The assembly and association is a guaranteed right to exist in every human being which is stipulated in the Declaration of Human Rights (DUHAM) and is specifically regulated in the International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR), in the manifestation of that right, human beings come together and form an organization which one of which is called mass organizations, the current organization arrangement in Indonesia is regulated through Law No. 16 of 2017, the rule is preceded by the issuance of Perppu No. 2 of 2017, with the issuance and legalization of the rule the Government of Indonesia has imposed restrictions on rights in ICCPR that have been ratified by Indonesia that raises the pros and cons. With this problem, this study aims to find out 1) How the implementation of arrangements on Social Organization (CSO) in terms of National Law and International Law. 2) How legal legal analysis of Law No. 16 of 2017 relates to the existence of CSOs in Indonesia in terms of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). To answer the above problems The author conducted research using legal research methods, normative juridical. The nature of this research is descriptive analytical. The results of the research indicate that there are contradiction in some articles of the mass organizations regulations on the implementation of the rules of international law and national law on the arrangement of CSOs in Indonesia and the legal consequences received by the Government of Indonesia as the state of ratification of the ICCPR for violation of the provision of restriction of rights in the ICCPR through the ham committee as the supervisor of the fulfillment and implementation of the rights regulated in the ICCPR. To that end, the Indonesian Government must revise the articles of Law No. 16 of 2017 which is contrary to the constitution and the rules of international law as well as the renewal of the organization's arrangements in Indonesia and the addition of rules in the ICCPR concerning the supervision and the firmer sanctions against the violating state provisions and fulfillment of the rights set forth in the ICCPR.

Key Notes: Mass organization(CSO), ICCPR, Laws of mass organization (CSO).